



Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

RENJA

2025

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif dengan data yang akurat, lengkap, aktual dan relevan sesuai permasalahan dan kebutuhan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja ini dapat menggerakkan partisipasi masyarakat, dengan demikian tugas yang di fasilitasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dibidang pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya kami berharap, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan bahan dalam penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 guna mendukung tujuan akhir Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



Putussibau, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu,

MARTHA BANANG, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian.....	1
1.1.2 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	9
EVALUASI HASIL RENJA TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal	22
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III.....	23
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV	31
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V	32
PENUTUP	32
4.1 Penutup	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan (Renja PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam prosesnya, penyusunan rencana kerja perangkat daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah (PD), evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah (Renja) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD).

1.1.1 Pengertian

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan Tahunan yang sifatnya operasional. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

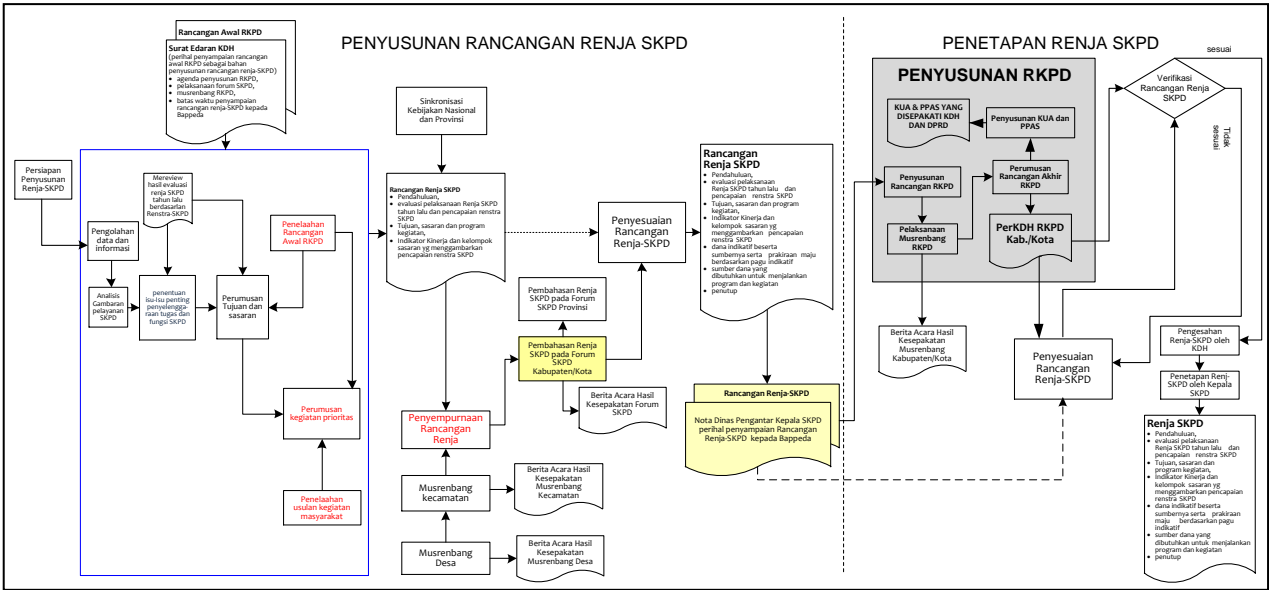
Rencana kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana Panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman dalam pembuatan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat daerah tiap tahunnya.

Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik .

1.1.1. Proses Penyusunan

Prinsip Penyusunan:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan dan urusan pelayanan wajib/pilihan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n+1.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/ Kota

Adapun Gambaran Penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - Orientasi Mengenai Renja
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisa gambaran pelayanan OPD;
 - Mereview evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
 - Pembahasan forum OPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja

The diagram illustrates the National Budgeting System (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) and its relationship with the National Financial System (Sistem Keuangan Nasional). It is divided into two main horizontal sections: **Pemerintah Pusat** (Central Government) at the top and **Pemerintah Daerah** (Local Government) at the bottom.

Central Government (Pemerintah Pusat):

- Left Column:** RPJP Nasional (National Medium-Term Development Plan) leads to RPJM Nasional (National Annual Budget) via *Pedoman* (Guideline).
- Middle Column:** RPJM Nasional leads to RKP (National Budget) via *Dijabarkan* (Detailed).
- Right Column:** RKA K/L (Central Government Budget Allocation) leads to Rincian APBN (Detailed APBN) via *Pedoman*. Rincian APBN leads to APBN (Annual Budget) via *Pedoman*. APBN leads to RAPBN (Annual Budget Report) via *Pedoman*. RAPBN leads to RKP via *Pedoman*. RKP leads to Renja K/L (National Medium-Term Budget Allocation) via *Diaju* (Submitted).
- Far Right:** Renja K/L leads to Renstra K/L (National Medium-Term Development Strategy) via *Pedoman*.

Local Government (Pemerintah Daerah):

- Left Column:** RPJM Provinsi (Provincial Medium-Term Development Plan) leads to RPJMD Kab/Kota (District/City Medium-Term Development Plan) via *Diaju*.
- Middle Column:** RPJMD Kab/Kota leads to RKPD (District/City Budget) via *Dijabarkan*.
- Right Column:** RKPD leads to RKA SKPD (District/City Budget Allocation) via *Pedoman*. RKA SKPD leads to Rincian APBD (Detailed APBD) via *Pedoman*. Rincian APBD leads to APBD (Annual Budget) via *Pedoman*. APBD leads to RAPBD (Annual Budget Report) via *Pedoman*. RAPBD leads to RKPD via *Pedoman*.
- Far Right:** RKPD leads to Renja SKPD (District/City Medium-Term Budget Allocation) via *Diaju*. Renja SKPD leads to Renstra SKPD (District/City Medium-Term Development Strategy) via *Pedoman*.

Inter-level Relationships:

- Vertical:** RPJM Nasional and RPJMD Kab/Kota are connected by a dotted line labeled *Diperhatikan* (Noticed/Attention). RPJM Provinsi and RPJMD Kab/Kota are connected by a dotted line labeled *Diaju*.
- Horizontal:** RKP and RKPD are connected by a dotted line labeled *Diserasikan melalui Musrenbang* (Coordinated through Musrenbang).

Legal Basis:

- UU No. 25/2004** tgg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning System Law) governs the left side of the diagram.
- UU No. 17/2003** tgg Keuangan Negara (National Financial System Law) governs the right side of the diagram.

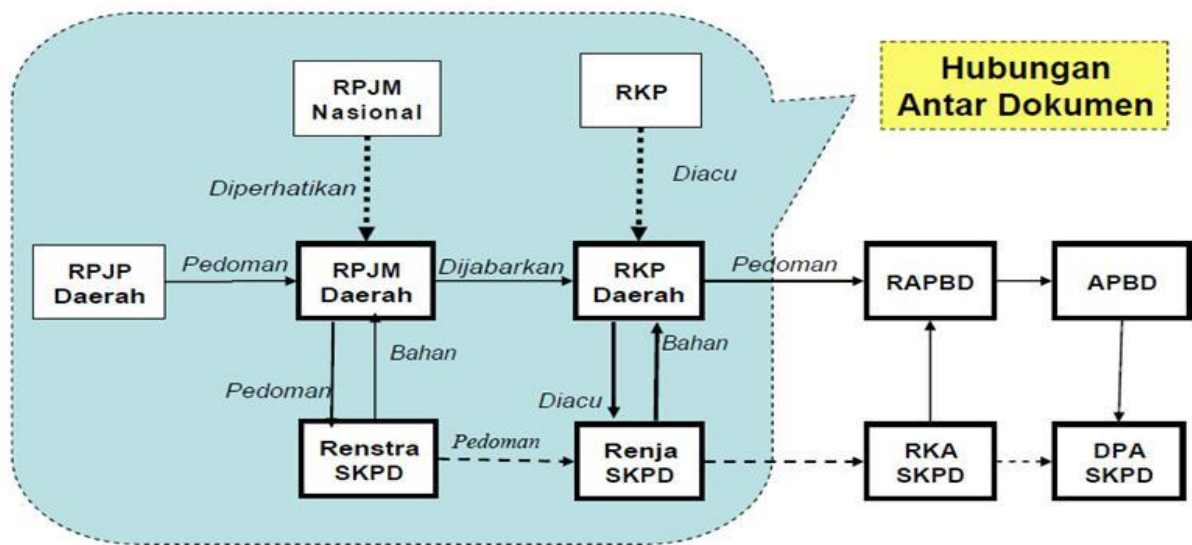
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kapuas Hulu bagian dari penjabaran dan memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD, yang kemudian akan diolah menjadi RKA OPD dan Penjabaran APBD.

Jadi secara garis besar Renja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pemberdayaan masyarakat sangat kuat keterkaitan kebijakan umum anggaran, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara khusus berfungsi sebagai pedoman dasar bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 sekaligus berfungsi secara umum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di daerah, bagi segenap pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan sasaran dan tujuan secara terarah, terencana, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut

merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, dilandaskan pada peraturan perundang-undangan diantaranya:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar pada standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
20. Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang akan menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 adalah untuk:

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Dokumen awal mekanisme penganggaran sebagai acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025.

Disamping itu, juga sebagai dasar mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD 2021-2026 agar terwujudnya kerangka pembangunan daerah yang kokoh, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diamanatkan dalam Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan program Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Awal Renja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Hasil Renja Tahun Lalu

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi; Tujuan Sasaran Renja; dan Program Kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada Bab ini akan dipaparkan Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Bab IV : Penutup

Pada Bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembuatan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025

BAB II EVALUASI HASIL RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2023 berdasarkan target indikator kinerja program /kegiatan yang memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Pemberdayaan Sosial;
5. Program Rehabilitasi Sosial;
6. Program Penanganan Bencana;
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
8. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
9. Program Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

Pada tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 10 Program dengan anggaran sebesar **Rp.7.530.146.342,00**. Anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp.7.194.234.027,00** atau sekitar 95,54% dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8=13/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat SAKIP	B	3.733.543.535	B	3.049.310.842		2.733.334.389		91,35
		Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	% 23.864.830	100	% 16.300.000	100	15.357.344	200,00	171,08
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen 2.635.380	5	Dokumen 1.800.000	5	1.625.297	160,00	138,80
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen 4.392.300	1	Dokumen 3.000.000	1	2.811.448	200,00	113,93
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Dokumen 3.660.250	1	Dokumen 2.500.000	1	2.484.000	200,00	212,17
		Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen 3.660.250	1	Dokumen 2.500.000	1	2.322.249	200,00	127,26
		Koordinasidan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	1	Dokumen 3.660.250	1	Dokumen 2.500.000	1	2.346.100	200,00	213,46

		Perubahan DPA-SKPD	SKPD								
		Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1Dokumen	2.928.200	1Dokumen	2.000.000	1	1.830.656	200,00	213,41
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4Laporan	2.928.200	4Laporan	2.000.000	4	1.937.594	125,00	194,01
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.775.094.783	14laporan	2.117.194.442	100	2.027.236.536	200,00	93,01
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan	14laporan	2.472.297.527	4laporan	26.975.000	14	1.830.095.086	100,00	184,09
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Jasa (Honorarium) Penanggungjawab an olaan Keuangan dan Tenaga Operator Komputer Per- triwulan	4laporan	283.881.084	4Dokumen	179.380.000	4	26.929.300	100,00	153,54
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun setiap bulan	12laporan	3.660.250	1Dokumen	2.500.000	72	160.030.600	750,00	358,36
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun per semesteran	2laporan	3.660.250	1Dokumen	3.500.000	2	2.304.000	100,00	148,49

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat waktu	1	Dokumen	5.124.350	1	Dokumen	1.920.000	1	3.477.850	100,00	159,14
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1	Dokumen	2.811.072	4	laporan	2.500.000	1	1.911.300	100,00	116,50
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun setiap bulan	4	laporan	3.660.250				4	2.488.400	125,00	176,33
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	27.600.800	100	%	27.600.800	30	25.188.000	100,00	100,00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	30	orang	27.600.800	30	orang	27.600.800	30	25.188.000	100,00	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	440.468.043	100	%	216.263.875	100	211.786.270	200,00	96,82
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Laporan	2.755.436	12	Laporan	1.000.000	12	1.000.000	125,00	149,96
		Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di	2	Unit	21.573.514	5	Unit	31.547.375	5	30.493.000	100,00	162,62

			Sediakan										
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Laporan	29.385.658	1	Paket	5.472.000	1	5.182.200	100,00	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4	Laporan	167.897.132	1	Paket	21.040.000	1	20.996.000	100,00	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2	Unit	21.573.514	2	Paket	22.877.500	2	22.085.570	125,00	110,97
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	29.385.658	12	Laporan	130.127.000	12	127.829.500	100,00	139,55
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Laporan	167.897.132	2	Dokumen	4.200.000	2	4.200.000	100,00	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	690.607.478	100	%	435.779.630	100	433.373.144	100,00	133,70
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	7.906.140	2	Laporan	5.939.800	1	5.894.800	125,00	127,75
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	104.882.268	12	Bulan	55.664.490	12	53.313.004	125,00	99,83
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3	Laporan	6.076.015	2	Laporan	6.090.000	2	6.080.000	133,33	138,74

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4Laporan	571.743.056	1Laporan	368.085.340	1	368.085.340	125,00	139,94
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Sarana Prasarana dan Aset dalam Kondisi BAIK	100%	22.364.704	100%	19.397.095	100	19.147.095	133,33	335,95
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1Laporan	14.400.000	1Unit	11.874.000	1	11.636.500	200,00	209,31
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2Laporan	7.964.704	1Unit	7.523.095	2	7.510.595	100,00	564,90
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	80%	6.945.846.942	85%	4.400.581.500	99	4.015.583.805	322,84	150,18

		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	100 %	6.078.404.294	100 %	4.030.060.500	1	4.015.583.805	25,00	157,77
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	1 Dokumen	6.078.404.294	1 Dokumen	4.030.060.500	4	3.941.145.328	300,00	157,77
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota -BPJS PBI dan Mandiri	Jumlah Laporan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin/ Orang Terlantar	4 Laporan	5.961.569.114	4 Laporan	3.954.557.500	2	74.438.477	200,00	134,03
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan	116.835.180	2 Laporan	75.503.000	99	4.015.583.805	200,00	1.368,94
		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	100 %	439.230.000	100 %	66.946.000	100	65.767.235	200,00	36,71
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti SosialPengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	40 Orang	439.230.000	10 orang	66.946.000	11	65.767.235	107,50	36,71

		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kab/kota	10 Orang		1 orang	220.000	1	220.000	100,00	100,00
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	439.230.000	13 orang	66.726.000	13	65.547.235	107,50	136,71
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat diberikan Pelayanan	100 %	242.454.960	100 %	189.697.000	100	189.605.998	100,00	206,57
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Doumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	1 Dokumen	242.454.960	1 Dokumen	189.697.000	1	189.605.998	200,00	206,57
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Laporan	242.454.960	92 Laporan	23.200.000	92	23.200.000	100,00	206,57
		PROGRAM PENANGANAN	Persentase Warga Negara			100 %	450.000	0	0	0	0

		WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Migran korban tindak Kekerasan yang dilakukan pemulangan								
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Doumen Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kab/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			1 Dokumen	450.000	0	0	0	0
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah Kab/Kota untuk di Pulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			2 Orang	450.000	0	0	0	0
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang dapat diberikan Pelayanan	100 %	137.442.388	100 %	84.748.000	100	83.096.700	93,94	130,59
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	1 Dokumen	14.457.988	1 Dokumen	19.548.000	1	19.176.700	100,00	363,29
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Laporan Keluarga Penerima Bantuan	5 Laporan	14.457.988	- -	-	-	-	140,00	363,29
		Penyediaan Makanan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Makanan			10 KK	19.548.000	10	19.176.700	100,00	103,23

		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	1Dokumen	122.984.400	1Dokumen	65.200.000	-	63.920.000	125,00	103,23
		Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah LaporanTagana pada Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	4Laporan	122.984.400	4Laporan	65.200.000	4	63.920.000	125,00	103,23
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan Pemeliharaan	100%	48.315.300	100%	28.680.000	100	28.680.000	125,00	155,63
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	12Laporan	48.315.300	2TMP	28.680.000	2	28.680.000	125,00	155,63
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota yang dilakukan Pemeliharaan	12Laporan	48.315.300	2Kegiatan	28.680.000	2	28.680.000	125,00	155,63
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pelayanan Perlindungan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terselesaikan	Persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak terselesaikan	76%	69.350.000	74%	80.254.000	36	78.165.900		

		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	150		48.315.300	200		52.679.500	162	50.954.700	-	68,30
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemenuhan Hak Anak	1	Dokumen	48.315.300	1	Dokumen	52.679.500	1	50.954.700	100,00	68,30
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	1	Dokumen	27.735.500	1	26.819.500	100,00	68,30
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	48.315.300	1	Dokumen	24.944.000	1	24.135.200	100,00	68,30
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga				2,51	%	8.479.000	2,21	8.470.000	100,00	100,00

		PEREMPUAN	Pemerintahan										
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			1	Dokumen	8.479.000	2	8.470.000	100,00	100,00	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen kegiatan orang yang difasilitasi yang melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya penyediaan layanan pemberdayaan perempuan			1	Dokumen	8.479.000	1	8.470.000	100,00	100,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pelatihan	0,50	%	100	%	19.095.500	100,00	18.741.200	100,00	149,67	339,62
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	2	Kecamatan	1	Kecamatan	19.095.500	1	18.741.200	1	150,00	339,62
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	2	Kecamatan	1	Kecamatan	19.095.500	1	18.741.200	1	150,00	339,62
Jumlah							100	%	7.530.146.342	95,54	7.194.234.027	98,20	148,32

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

Kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku instansi yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus selalu memberikan kinerja yang baik dalam pelayanan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuat untuk mendapatkan gambaran bagaimana tingkat kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap masyarakat. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dibuat dalam bentuk tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2 T-C 30
Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu

NO	INDIKATOR	TARGET			REALISASI			CATATAN ANALISIS
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1.	Predikat SAKIP	B	B	BB	B	B	-	
2	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	80%	85%	85%	68.69%	78.94%	-	
3	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	72%	74%	76%	70.58%	41.18%	-	

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut (Tabel 2.3) dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Tabel 2.3
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi / rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
1.	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kualitatif	Capaian Indikator = $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan bantuan PBI Pemmda, PKH, BNPT, dan PBI JK}}{\text{Populasi Masyarakat Miskin di Kab Kapuas Hulu}} \times 100 \%$		
2.	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	Kualitatif	Capaian Indikator = $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus keseluruhan}} \times 100 \%$		

Pencapaian Indikator Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP	%	B	B	100,00
2.	Meningkatnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	% PMKS	%	85	78.94	92.87
3.	Meningkatnya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan	%	74	41.18	55.64

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 disimpulkan bahwa sebagian indikator sasaran ber kriteria Baik/ Sangat Tinggi dengan rata capaian sebesar 90% dan masih ada yang belum mencapai dikarenakan beberapa kendala.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Isu-Isu Strategis dan Rencana Kerja 2023 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masing-masing tugas dan fungsi ini dijabarkan melalui program dan Kegiatan di Sub Bagian Umum dan Aparatur, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Program, Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Program dan Kegiatan berdasarkan pada kondisi strategis, isu pokok yang berkembang serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai. Dalam menyusun Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga memperhatikan Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu

organisasi. Sehingga Renstra mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Permasalahan Strategis yang dihadapi dalam pembinaan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan saat ini antara lain :

- a. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi
- b. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender.
- c. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan.
- d. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender.
- e. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
- f. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
- g. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
- h. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender.
- i. Masih rendahnya jumlah bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak.

Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun identifikasi Permasalahan di Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial sebagai berikut:

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 (lampiran).

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penetapan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bentuk pengembangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya, mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, maka ditetapkan visi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

” Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil ”

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu Yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kreatif Menuju Desa Mandiri, Pengembangan Aktivitas Ekonomi yang Adil dan Prorakyat, serta Ramah Investasi;
3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang Sejahtera dalam Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu bagi Masyarakat.

Dari lima misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak dan Perempuan terdapat pada misi ke dua dan misi ke empat. Dari misi tersebut tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ingin dicapai antara lain adalah:

- a. Persentase Pelayanan PMKS yang tertangani;
- b. Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan;
- c. Predikat SAKIP.

Sedangkan Sasaran yang akan dicapai pada urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator :

- a. Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan.
- c. Meningkatnya Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

a. Sasaran Strategis urusan Sosial

1. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
2. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar
3. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
4. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

b. Sasaran Strategis urusan PP dan PA

1. Jumlah Kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
2. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
3. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur kebijakan
4. Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dengan satuan ukur K/L, prov/kab/kota dan organisasi
5. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif dengan satuan ukur persentase

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan

ditetapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tujuan

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

2.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
2. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Menetapkan Sasaran Sebagai berikut:

Sasaran 1 : *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu*

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu” diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025:

Jumlah Program	: 11
Jumlah Kegiatan	: 20
Pagu Indikatif APBD	: Rp.4.116.711.600,00
Pagu Indikatif APBN/TP	: -
Pagu Indikatif APBN/DAK	: -

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e) Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Kuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran 2 : Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :

1) Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin undian Gratis Berhadiah Pengumpulan Uang atau Barang

2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota

- a) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Kegiatan :

- 1) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**

- a) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

d. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan :

1). Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan Pengemis yang di luar Panti Sosial

- a) Penyediaan Permakanan
- b) Penyediaan Sandang
- c) Penyediaan Alat bantu
- d) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- e) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- f) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- g) Pemberian Layanan Rujukan

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan :

1). Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b). Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

f. Program Penanganan Bencana

Kegiatan:

1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Makanan
- b) Penyediaan Sandang

2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota

- a) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

g. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan

Kegiatan :

1). Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

h. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota

- a) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan Kab/Kota

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

i. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

1). Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

- a). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.

j. Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan :

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota"

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

k. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan

- 1) Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Aspek Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Adapun Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel 4.1 (lampiran).

BAB V PENUTUP

4.1 Penutup


Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan Sistem Administrasi Negara yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah sebagai alat umpan balik (Feed back) yang dapat digunakan manajemen dalam rangka memberikan masukan / pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sekaligus pertanggungjawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan penjabaran dari Visi dan Misi SKPD.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu umumnya dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi yang ditunjuk melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, 31 Desember 2024
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu,




MARTHA BANANG, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651123 199203 2 006

TABEL 2.6
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

OPD : DINAS SOSISAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	A. PREDIKAT SAKIP	B	Rp 2.799.885.355,00	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Kapuas Hulu	A. PREDIKAT SAKIP	B	Rp 3.240.095.700,00	
I.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	I. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	Rp 16.273.500,00	I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	I. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	Rp 16.273.500,00	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 1.773.500,00	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 1.773.500,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.280.000,00	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.280.000,00	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.780.000,00	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.780.000,00	
4.	Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.780.000,00	4. Koordinasidan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.780.000,00	
5.	Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.780.000,00	5. Koordinasidan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.780.000,00	
6.	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	6. Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 4.880.000,00	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 4.880.000,00	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	II. Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 laporan	Rp 2.215.089.395,00	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	II. Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Dokumen	Rp 2.783.595.000,00	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah orang yang mmenerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/Bulan	Rp 2.001.345.395,00	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah orang yang mmenerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/Bulan	Rp 2.587.295.000,00	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrsi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Rp 25.560.000,00	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah DokumenHasil Penyediaan Administrsi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Rp 25.560.000,00	
3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Dokumen Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Rp 178.182.000,00	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Dokumen Penatausahaan/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Rp 161.254.000,00	
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 1.776.000,00	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Rp 1.660.000,00	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat Waktu	4 laporan	Rp 3.313.000,00	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun tepat Waktu	4 laporan	Rp 3.163.000,00	
	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Dokumen	Rp 1.600.000,00	6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	1 Dokumen	Rp 1.500.000,00	
	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun setiap Bulannya	4 laporan	Rp 3.313.000,00	7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah Laporan keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun setiap Bulannya	4 laporan	Rp 3.163.000,00	
						III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	III Jumlah Dokumen kepegawaian Perangkat daerah	1 Dokumen	Rp 13.823.000,00	
						1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah pegawai berdasrkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	Rp 13.823.000,00	
	III Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	III Jumlah Dokumen administrasi Umum	11 Dokumen	Rp 200.120.000,00	IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kapuas Hulu	IV Jumlah Dokumen administrasi Umum	10 Dokumen	Rp 200.552.500,00	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Paket komponen listrik/ penerangan bangunan yang disediakan	1 Paket	Rp 2.060.000,00	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang disediakan	1 Paket	Rp 1.848.000,00	
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Paket Pelatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	Rp 27.473.000,00	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Paket Pelatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 13.460.000,00	
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 5.817.000,00	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Rp 5.817.000,00	
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	2 Paket	Rp 9.200.000,00	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	2 Paket	Rp 9.200.000,00	
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah paket barang cetakan / penggandaanyang disediakan	2 Paket	Rp 24.000.000,00	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah paket barang cetakan / penggandaan yang disediakan	2 Paket	Rp 23.957.500,00	
	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 123.170.000,00	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kapuas Hulu	6 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 137.660.000,00	
	7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 8.400.000,00	7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kapuas Hulu	7 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 8.610.000,00	
	IV Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	IV Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	Rp 350.518.864,00	V Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kapuas Hulu	V Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	Rp 207.968.104,00	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 4.700.000,00	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 4.700.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	4 Laporan	Rp 70.443.080,00	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 64.568.504,00	
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 3.410.000,00	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	Rp 3.410.000,00	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Rp 271.965.784,00	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	0 Laporan	Rp 135.289.600,00	
	V Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	V Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	Rp 17.883.596,00	VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kapuas Hulu	VI Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	Rp 17.883.596,00	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayrkan pajaknya	1 Unit	Rp 10.624.000,00	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 10.624.000,00	
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayrkan pajaknya	1 Unit	Rp 7.259.596,00	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Rp 7.259.596,00	
	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	80 %	Rp 201.294.000,00	B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Penanganan dan Pelayanan PMKS	80 %	Rp 221.707.000,00	
						VII Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kab/Kota	Kab. Kapuas Hulu	VII Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 10.263.000,00	
						1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2 Dokumen	Rp 10.263.000,00	
	VI Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	VI persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100 %	Rp 201.294.000,00	VIII Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	VIII persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	100 %	Rp 211.444.000,00	
	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 JumlahTenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	23 Orang	Rp 168.932.000,00	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kab/kota	23 Orang	Rp 179.082.000,00	
	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 JumlahLembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab /Kota	2 Lembaga	Rp 32.362.000,00	2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab /Kota	2 Lembaga	Rp 32.362.000,00	
	C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	60 %	Rp 4.200.700,00	C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kab. Kapuas Hulu	C. Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilakukan pemulangan	100 %	Rp 4.088.000,00	
	VII Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	VII Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2 orang	Rp 4.200.700,00	IX Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	IX Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2 orang	Rp 4.088.000,00	



	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kewenangan kab/kota	2 orang	Rp 4.200.700,00	1. Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kewenangan kab/kota	2 orang	Rp 4.088.000,00	
	D. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	D. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	100%	Rp 93.539.000,00	D. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	D. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat diberikan pelayanan	100%	Rp 360.815.200,00	
	VIII Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kapuas Hulu	VIII Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	21 orang	Rp 93.539.000,00	X Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kapuas Hulu	X Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang direhabilitasi	21 orang	Rp 360.815.200,00	
	1. Penyediaan Permakanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	6 orang	Rp 1.320.000,00	1. Penyediaan Permakanan	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kab/Kota	6 orang	Rp 33.252.000,00	
						2. Penyediaan Sandang	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kab/Kota	20 orang	Rp 36.295.000,00	
	2. Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kab/Kota	6 orang	Rp 11.663.000,00	3. Penyediaan Alat Bantu	Kab. Kapuas Hulu	3. Jumlah orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kab/Kota	6 orang	Rp 205.613.000,00	
						4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	4. Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga kewenangan Kab/Kota	2 orang	Rp 5.225.000,00	
						5. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Kapuas Hulu	5. Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	100 orang	Rp 3.564.600,00	
						6. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Kapuas Hulu	6. Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kab/Kota	2 orang	Rp 4.475.000,00	
	3 Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	2. Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kab/Kota	15 orang	Rp 80.556.000,00	7 Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Kapuas Hulu	7. Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rujukan kewenangan Kab/Kota	15 orang	Rp 72.390.600,00	
	E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Keluarga Penerima Manfaat	100%	Rp 54.487.000,00	E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Kapuas Hulu	B. Persentase Keluarga Penerima Manfaat	100%	Rp 68.097.200,00	
	IX Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	IX Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2 Dokumen	Rp 54.487.000,00	XI Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XI Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin	2 Dokumen	Rp 68.097.200,00	
						1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1. Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	30 orang	Rp 11.635.000,00	

[illegible]

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	H. persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	2,51 %	Rp 20.514.000,00	H. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	H. persentase Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	2,51 %	Rp 48.797.500,00	
	XIII Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIII Jumlah Dokumen sosialisasi PUG	1 Dokumen	Rp 10.387.000,00	XV Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XV Jumlah Dokumen sosialisasi PUG	1 Dokumen	Rp 35.350.000,00	
	1 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kab /Kota	50 orang	Rp 10.387.000,00	1 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kab /Kota	27 orang	Rp 35.350.000,00	
	XIV Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIV Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	1 Kegiatan	Rp 10.127.000,00	XVI Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVI Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	1 Kegiatan	Rp 13.447.500,00	
	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab /Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Orang	Rp 10.127.000,00	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kab /Kota yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Orang	Rp 13.447.500,00	
	I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	I. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	Rp 12.792.000,00	I. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Kapuas Hulu	I. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	Rp 118.000,00	
	XV Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XV Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	Rp 12.792.000,00	XVII Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVII Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	1 Dokumen	Rp 118.000,00	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	1 Layanan	Rp 12.792.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Singkronisasi bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	1 Layanan	Rp 118.000,00	
	J. PROGRAM PEEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Kapuas Hulu	J. Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	200	Rp 72.133.000,00	J. PROGRAM PEEMENUHAN HAK ANAK	Kab. Kapuas Hulu	J. Nilai capaian Kabupaten Layak Anak (pratama, madya, nindya, utama, KLA)	200	Rp 96.235.000,00	
	XVI Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVI Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 24.404.000,00	XVIII Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVIII Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 38.919.000,00	
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	Rp 24.404.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	1 Dokumen	Rp 38.919.000,00	

	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	XVII Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVII Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 47.729.000,00	XIX Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XIX Jumlah dokumen	1 Dokumen	Rp 57.316.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 8.925.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan penigkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	1 Dokumen	Rp 20.425.500,00	
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	3 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 38.804.000,00	2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	2 Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 36.890.500,00	
	K. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Kapuas Hulu	K. Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani	15 %	Rp 14.400.000,00	K. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Kapuas Hulu	K. Persentase kasus anak korban kekerasan yang tertangani	50 %	Rp 14.690.500,00	
	XVIII Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XVIII Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 14.400.000,00	XX Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	XX Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp 14.690.500,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (ANPK) yang mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Dokumen	Rp 14.400.000,00	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kapuas Hulu	1 Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan Khusus (ANPK) yang mendapatkan Layanan Pengaduan	2 orang	Rp 14.690.500,00	
	JUMLAH				Rp 3.373.170.555,00					Rp 4.166.711.600,00	

Putussibau, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAPUAS HULU


MARTHA BANANG, S.H.M.M
NIP. 19651123 199203 2 006

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2025										

Organisasi : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				Rp. 221.707.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 221.707.000,00	Rp. 221.707.000,00
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 10.263.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.263.000,00	Rp. 10.263.000,00
1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.263.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.263.000,00	Rp. 10.263.000,00
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 211.444.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 211.444.000,00	Rp. 211.444.000,00
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 179.082.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 179.082.000,00	Rp. 179.082.000,00
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 32.362.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.362.000,00	Rp. 32.362.000,00
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				Rp. 4.088.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.088.000,00	Rp. 4.088.000,00
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				Rp. 4.088.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.088.000,00	Rp. 4.088.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.088.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.088.000,00	Rp. 4.088.000,00
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				Rp. 360.815.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 360.815.200,00	Rp. 360.815.200,00
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				Rp. 360.815.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 360.815.200,00	Rp. 360.815.200,00
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 33.252.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.252.000,00	Rp. 33.252.000,00
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 36.295.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.295.000,00	Rp. 36.295.000,00
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 205.613.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 205.613.000,00	Rp. 205.613.000,00
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.225.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.225.000,00	Rp. 5.225.000,00
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.564.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.564.600,00	Rp. 3.564.600,00
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.475.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.475.000,00	Rp. 4.475.000,00
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 72.390.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 72.390.600,00	Rp. 72.390.600,00
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				Rp. 68.097.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 68.097.200,00	Rp. 105.670.400,00
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 68.097.200,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 68.097.200,00	Rp. 105.670.400,00
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.635.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.635.000,00	Rp. 0

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 39.936.200,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 39.936.200,00	Rp. 87.491.800,00
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.526.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.526.000,00	Rp. 18.178.600,00
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				Rp. 85.055.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 85.055.500,00	Rp. 83.875.050,00
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				Rp. 32.603.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 32.603.500,00	Rp. 23.697.850,00
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.853.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.853.500,00	Rp. 23.697.850,00
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.750.000,00	Rp. 0
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				Rp. 52.452.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 52.452.000,00	Rp. 60.177.200,00
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.452.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 52.452.000,00	Rp. 60.177.200,00
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				Rp. 27.012.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 27.012.000,00	Rp. 34.630.200,00
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Rp. 27.012.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 27.012.000,00	Rp. 34.630.200,00
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 27.012.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 27.012.000,00	Rp. 34.630.200,00
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 3.228.295.700,00	Rp. 11.800.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.240.095.700,00	Rp. 3.240.095.700,00
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 16.273.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 16.273.500,00	Rp. 16.273.500,00
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.773.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.773.500,00	Rp. 1.773.500,00
1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 2.280.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.280.000,00	Rp. 2.280.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.780.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00
1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.780.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00
1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.780.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.780.000,00	Rp. 1.780.000,00
1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 2.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 4.880.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.880.000,00	Rp. 4.880.000,00
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 2.783.595.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 2.783.595.000,00	Rp. 2.783.595.000,00
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.587.295.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 2.587.295.000,00	Rp. 2.587.295.000,00
1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 25.560.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.560.000,00	Rp. 25.560.000,00
1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 161.254.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 161.254.000,00	Rp. 161.254.000,00
1	06	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.660.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.660.000,00	Rp. 1.660.000,00
1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 3.163.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.163.000,00	Rp. 3.163.000,00
1	06	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.500.000,00	Rp. 1.500.000,00
1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 3.163.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.163.000,00	Rp. 3.163.000,00
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 13.823.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.823.000,00	Rp. 13.823.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.823.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.823.000,00	Rp. 13.823.000,00
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 188.752.500,00	Rp. 11.800.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 200.552.500,00	Rp. 200.552.500,00
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.848.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.848.000,00	Rp. 1.848.000,00
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 1.660.000,00	Rp. 11.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.460.000,00	Rp. 13.460.000,00
1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 5.817.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.817.000,00	Rp. 5.817.000,00
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 9.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.200.000,00	Rp. 9.200.000,00
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 23.957.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.957.500,00	Rp. 23.957.500,00
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 137.660.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 137.660.000,00	Rp. 137.660.000,00
1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 8.610.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.610.000,00	Rp. 8.610.000,00
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 207.968.104,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 207.968.104,00	Rp. 207.968.104,00
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 4.700.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.700.000,00	Rp. 4.700.000,00
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 64.568.504,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 64.568.504,00	Rp. 64.568.504,00
1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 3.410.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.410.000,00	Rp. 3.410.000,00
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 135.289.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 135.289.600,00	Rp. 135.289.600,00
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 17.883.596,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 17.883.596,00	Rp. 17.883.596,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 10.624.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.624.000,00	Rp. 10.624.000,00
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 7.259.596,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.259.596,00	Rp. 7.259.596,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				Rp. 48.797.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 48.797.500,00	Rp. 48.797.500,00
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 35.350.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 35.350.000,00	Rp. 35.350.000,00
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Kota		Rp. 35.350.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.350.000,00	Rp. 35.350.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 13.447.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 13.447.500,00	Rp. 13.447.500,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Putussibau Utara, Semua Kel/Desa		Rp. 13.447.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.447.500,00	Rp. 13.447.500,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				Rp. 118.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 118.000,00	Rp. 118.000,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 118.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 118.000,00	Rp. 118.000,00
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pajak Daerah	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 118.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 118.000,00	Rp. 118.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				Rp. 96.235.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 96.235.000,00	Rp. 96.235.000,00
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp. 38.919.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 38.919.000,00	Rp. 38.919.000,00
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 38.919.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.919.000,00	Rp. 38.919.000,00

[illegible]